

Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global

Agus Widjojo*

Lembaga Pertahanan Nasional, Republik Indonesia

Pemantapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting guna mengembalikan ruh karakter bangsa Indonesia di tengah gempuran arus globalisasi dan era modern saat ini. Kuatnya karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai program ketahanan nasional.

Kata kunci: pemantapan; ideologi; Pancasila, ketahanan nasional

Pendahuluan

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga Era Reformasi yang telah berjalan kurang lebih 18 tahun, masih diwarnai oleh berbagai dinamika politik, diantaranya bahkan telah berkembang menjadi gangguan keamanan yang mempengaruhi stabilitas nasional. Akibatnya, masyarakat menjadi tersegmentasi berdasarkan kelompok ideologi, kedaerahan, kelompok kepentingan, dan keagamaan, sehingga kondisi persatuan menjadi kendor dan kesatuan bangsa menjadi semakin renggang. Di sisi lain, benturan kepentingan politik yang terjadi menjadi faktor yang sangat menghambat kemajuan bangsa, karena terabaikannya proses pembangunan nasional sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, dan berujung pada menurunnya ketahanan nasional.

*Surel: humas@lemhanas.go.id

ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569

© 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

<http://www.fh.unnes.ac.id>

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

© 2016. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Sejarah telah menunjukkan bahwa keberhasilan bangsa Indonesia memerdekakan diri, karena ketika itu seluruh warga bangsa mempunyai kehendak dan cita-cita yang sama. Sebaliknya sejarah juga membuktikan, bahwa ketika bangsa ini melupakan tujuan bersamanya, serta dengan sadar telah mengingkari konsensus yang dilandasi oleh kehendak bersama, maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai bentuk konflik sosial dan politik, perlawanan dan pemberontakan bersenjata, dan munculnya ide-ide untuk mengganti ideologi negara dan gerakan separatis dari berbagai daerah.

Kesadaran kebangsaan yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia pada jamannya (era 1908 dan era 1928), yang kemudian telah melahirkan dan mendorong diwujudkannya cita-cita kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya tumbuh dan berkembang karena dorongan kehendak bersama dari seluruh komponen masyarakat (bangsa Indonesia) yang berbeda suku, etnis, agama, budaya, yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Tujuannya, tidak lain adalah demi mewujudkan keinginan untuk membangun satu masyarakat baru yang meskipun berneka ragam suku-agama-ras-antar golongan (plural dan multikultur) dan tersebar di berbagaidaerah dan wilayah kepulauan yang luas namun sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa (Indonesia).

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno dalam amanatnya pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Mei 1965 (Naskah Dokumen Departemen Penerangan RI), yang mensitir teori Ernest Renan maupun Otto Bauer, bahwa “Bangsa (*Nation*) adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu dan hidup bersama (*the desire to live together*). Bangsa adalah juga merupakan masyarakat dengan kesatuan spirit/karakter (*Karakter Gemeinschaft*)”. Disamping itu, Bung Karno menegaskan betapa pentingnya Geopolitik, sehingga tidak hanya keutuhan bangsa yang penting, tetapi juga keutuhan tanah air.

Sikap dan cara pandang Bung Karno, seperti halnya dengan para pencetus ide kebangsaan Indonesia lainnya, menunjukkan suatu kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa bangsa Indonesia yang akan dibangun dan dicita-citakan adalah sebuah himpunan dari berbagai ragam masyarakat budaya, adat, bahasa lokal/daerah, bahkan juga agama dan keyakinan yang berbeda-beda dan majemuk. Dari pandangan para pendiri bangsa dan negara (*founding-fathers*) yang lain pun tampak jelas bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau unifikasi. Keaneka-ragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. (Bhineka Tunggal Ika). Disadari pula,

bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya.

Sadar akan kenyataan tersebut, maka kehendak untuk bersatu dan hidup bersama dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan harus senantiasa terjaga dan terpelihara oleh bangsa Indonesia. Kehendak itulah yang merupakan faktor perekat utama dan seharusnya tetap menjiwai serta menyemangati setiap warga bangsa dalam rangka menata dan membangun bangsa (*nation building*) yang didalamnya nanti akandibangun karakter atau jati diri bangsa (*nation character building*) dan yang didalamnya juga akan dibangun sistem kenegaraan (*national state system building*).

Dengan cerdas dan bijak serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara (*national state system building*), serta di dalam membentuk jati-diri bangsa (*nation character building*) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai negara bangsa.

Era globalisasi saat ini ditandai dengan munculnya revolusi *Triple T* (3T) yang mengancam dunia tidak hanya di Indonesia, yaitu *Technology*, *Transportation*, *Telecommunication* dan *Travel/Tourism*. Hubungan antarpribadi dan antarkelompok sudah sedemikian dekat sehingga batas-batas antarwilayah menjadi kabur (*borderless area*). Kejadian yang berlangsung di suatu wilayah tertentu dapat dilihat atau dideteksi di wilayah lain dalam hitungan detik.

Sehubungan dengan era global tersebut, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengidentifikasi adanya 6 kelompok ancaman atau bahaya secara global (*six clusters of threats*) yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia saat ini, yaitu:

1. Ancaman sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, penyakit menular dan kerusakan lingkungan;
2. Konflik antarnegara;
3. Konflik internal, termasuk perang saudara, genosida dan kekejaman berskala besar lainnya;
4. Senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi;
5. Terorisme; dan
6. Kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Di sisi lain, pembangunan nasional negara-negara berkembang secara tajam dan komprehensif tergambar dalam *The Millenium*

Development Goals (MDGs) tahun 2005 yang oleh Kofi Annan disebut sebagai “*An Unprecedented Promise by World Leaders to Address, As a single package, Peace Security, Development, Human Rights and Fundamental Freedom*” dengan target waktu sampai dengan tahun 2015, dan berlanjut SDG.

Mensitir arahan Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 di hadapan para Peserta PPRA 54 dan 55 menyampaikan bahwa bangsa-bangsa dan negara di dunia serta Indonesia menghadapi persoalan makro/pertarungan global yaitu perebutan masalah energi, masalah pangan, dan masalah air; Era ini adalah era kompetisi dan era persaingan maka kata kuncinya adalah peningkatan kualitas SDM Masyarakat dan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Presiden Jokowi dalam programnya telah menetapkan Revolusi Mental dengan Nawa Citanya (9 program utama).

Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016, yang bertema “SATUKAN LANGKAH UNTUK NEGERI”. Menteri Sosial, menyampaikan bahwa: gerakan Revolusi Mental diharapkan bisa mendorong gerakan hidup baru, “untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Proses reformasi yang sedang berlangsung saat ini, pada dasarnya merupakan suatu proses reinventing and rebuilding serta konsolidasi bangsa Indonesia menuju masyarakat demokratis yang modern dan sekaligus merupakan kesadaran korektif untuk menata kembali kehidupannya agar menjadi lebih baik demi pencapaian tujuan dan cita-cita nasionalnya. Namun, pada tataran empirik terindikasi bahwa reformasi ternyata belum berjalan seperti yang diharapkan semula, yaitu sebagai sebuah proses perubahan yang sistematis dan terukur. Hal ini terlihat pada penerapan hak kebebasan individu dan kelompok yang bahkan melahirkan konflik vertikal dan horisontal. Di sisi lain, tuntutan pemekaran wilayah yang dianggap sebagai wujud ekspresi kebebasan lokal, dalam praktiknya telah berkembang semakin luas dan semakin sulit dikendalikan. Munculah ego-sektoral, ego kedaerahan, ego kesukuan, ego kelompok agama, yang semuanya seringkali mengabaikan terhadap keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pengaruh perkembangan internal (di dalam negeri) yang menghendaki pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi semakin penting dengan semakin besarnya pengaruh budaya, pandangan hidup, sistem politik, tata nilai, dan sistem ekonomi yang berkembang di dalam lingkungan tata kehidupan masyarakat internasional. Sangat disadari, bahwa pengaruh kehidupan pada tataran atau lingkungan internasional tersebut, seringkali tidak sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia dan bahkan telah mulai memudarkan secara

pelan namun pasti terhadap rasa kebangsaan di hampir semua lapisan generasi bangsa Indonesia. Pengaruh ini sulit untuk dapat dibendung sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi, karena begitu mudahnya mengunggah berbagai informasi dan membawa pengetahuan dan tata-nilai baru yang berasal dari luar negeri.

Persaingan yang sangat keras dalam memperebutkan pengaruh politik melalui kekuatan militer dan penyebaran paham politik, serta penguasaan ekonomi yang dilakukan melalui perebutan dan penguasaan sumber-sumber daya alam dan potensi pasar ekonomi dunia dengan mempergunakan kemajuan teknologi, membangun ketergantungan sistem keuangan, dan sistem perdagangan pasar terbuka, harus menjadi perhatian dan dijadikan sebuah tantangan riil (*the real of challenge*) yang harus dihadapi secara bersama-sama bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam membangun bangsa dan mempersiapkan generasi bangsa Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju dalam perebutan sumber daya alam dan potensi pasar ekonomi di tingkat global, kiranya perlu dibangun kekuatan nasional (*national incorporated power*) yang dijiwai dan disemangati oleh suatu kesadaran kebangsaan sebagai landasan moral pengabdian bagi generasi bangsa Indonesia.

Bila keadaan bangsa ini dibiarkan terus larut ke dalam situasi sebagaimana gambaran di atas, serta tanpa upaya nyata untuk segera mengatasinya, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi semakin rapuh. Bila kesadaran kebangsaan tidak pernah terpatrikan di dalam sanubari setiap warga negara, maka cita-cita luhur untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta berkehidupan kebangsaan yang bebas itu hanya akan menjadi kenangan sejarah. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang sejak awal tumbuhnya kesadaran berbangsa telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan materi yang tak ternilai itu, akan sirna dari muka bumi, tercabik-cabik oleh semangat dis-integrasi yang tak terkendali.

Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi

Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang, beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya (zaman kerajaan dan penjajahan) berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa

yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip [lima sila] yang kemudian diberi nama Pancasila.

Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi Dasar Negara Indonesia, secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesiasendiri. Sehingga asal muasal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama para intelektual untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan ilmiah sebagai ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang akan mendasari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangun atau konstruksi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini harus disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diinstitutionalkan kepada semua warga bangsa secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga segenap komponen bangsa akan mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan nilai-nilai nasionalnya untuk memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaannya.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan ideologi (dalam pengertian: ide-ide dasar tentang sistem yang akan diwujudkan atau *a system of ideas*) dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sehingga berkedudukan sebagai ideologi negara, merupakan rujukan yang paling dasar atau fundamen atas semua aturan hukum yang akan dibuat untuk mengatur seluruh kehidupan negara dan bangsa sehingga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), dan juga sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia (*philosophy and way of life of nations*).

Pancasila sebagai ideologi negara bermakna bahwa sila-sila dalam Pancasila nilai-nilainya merupakan ide dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang dicita-citakan. Nilai-nilai filosofi untuk mengatur tata kehidupan kenegaraan Indonesia (*filosofische groundslag*) yang terdapat dalam Pancasila selanjutnya ditetapkan sebagai Dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan yuridis formal karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat dengan adanya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan pencabutan Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978 tentang P4, dimana dalam Pasal I

menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila juga merupakan cita hukum atau sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam negara. Pancasila sebagai cita hukum harus menguasai dan melingkupi hukum dasar (konstitusi) dan norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang bersifat konstitutif dan sebagai dasar hukum yang bersifat regulatif. Hal ini bermakna bahwa hukum dasar (konstitusi) negara Indonesia dan semua produk hukum positif yang bersifat mengatur (regulatif), nilai-nilai yang dikandungnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila.

Pancasila merupakan hasil pemikiran dan kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang sumbernya tidak lain adalah dari kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk (plural) dengan berbagai ragam budaya, suku bangsa, agama, serta bahasa (multikultural). Ketika bangsa Indonesia berupaya untuk membentuk bangsa yang merdeka dan mendirikan negara yang berdaulat, maka para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) bersepakat (mengadakan Perjanjian Luhur) untuk menetapkan cita-cita luhur (falsafah hidup) bangsa Indonesia yang harus diwujudkan kemudian hari dan yang akan mendasari semua penyelenggaraan kehidupan dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan falsafah hidup yang menjadi cita-cita dan sekaligus landasan moral bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila di Tengah Perubahan Dunia (Global) dan Implikasinya

Sejak usainya perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur (dengan warna persaingan antarliberal-kapitalisme dengan sosial-komunisme), maka percaturan global saat ini mengalami perubahan yang sangat dinamis. Persaingan kekuatan antar negara tidak hanya didasarkan pada identitas ideologi semata, melainkan telah berkembang menjadi persaingan antar kekuatan ataupun kepentingan lainnya, antara lain: ekonomi, militer, budaya, politik, hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan energi, pangan dan air.

Negara-negara eks-Blok Barat telah mengubah cara pandang geopolitiknya, dimana mereka melakukan perubahan pendekatan dalam rangka memperluas dan menjaga pengaruh hegemoninya antara lain : meredefinisi faham liberal ke model neo-liberal; memakai lembaga-lembaga internasional sebagai sarana untuk mengatur ekonomi dunia

ataupun untuk “melakukan intervensi di suatu wilayah” (seperti: IMF, World Bank, WTO, Organisasi Regional, Dewan Keamanan PBB), menggunakan berbagai isu untuk melakukan perubahan di berbagai negara (seperti issue: Demokratisasi, HAM, mempunyai senjata pemusnah massal); menekan berbagai negara untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya ekonomi menggunakan issue lingkungan hidup, perburuan yang tidak adil, pelanggaran Hak Asasi, dan penghapusan subsidi untuk komoditi ekonomi, serta penerapan sanksi dan non-tariff barrier untuk melindungi kepentingan internalnya. Bahkan saat ini negara-negara ini telah mendorong terwujudnya sistem perdagangan dan investasi “pasar bebas” di dunia, dalam rangka memperluas hegemoni ekonominya.

Disamping itu berbagai negara ini juga telah melakukan redefinisi terhadap faktor penyebab perang yang akan datang yang menyatakan bahwa “perang yang akan datang bukan disebabkan oleh persaingan ideologi melainkan disebabkan oleh faktor perbenturan budaya” (Samuel Huntington, 1998). Hal ini mulai nyata dengan terjadinya perbenturan budaya dan kepentingan mereka dengan kelompok Islam garis keras di wilayah Timur Tengah (ISIS, Al-Qaeda dll). Pengaruh dan penetrasi dari kelompok negara-negara neo-liberal ini mulai terasa bagi Indonesia, yang terlihat melalui berbagai perubahan di bidang ekonomi dan perdagangan dimana kita menuju pasar bebas, penghapusan subsidi di beberapa bidang, sistem moneter dan perbankan yang terintegrasi secara global, peranan negara lebih berfungsi sebagai regulator dan sebagainya.

Seiring dengan itu, kaum Globalis dan Kosmopolitanis sebagai kelompok kepentingan dari negara-negara maju, melalui berbagai produk-produk industri trans-nasionalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus mengembangkan konsep tentang komunitas dunia yang melewati batas-batas kedaulatan negara dan bangsa. Kelompok ini juga mendorong berkembangnya cara pandang yang individualistis, hedonis, materialistis, konsumeritis, dan negara dianggap tidak penting lagi. Sadar atau tidak sadar hampir sebagian besar manusia di muka bumi ini telah menjadi bagian dari komunitas kosmopolitan ini melalui jaringan informasi internet. Disisi akan menumbuhkan sikap ego yang tinggi dan kurang rasa sosial.

Disisi yang lain negara-negara eks-Komunis juga telah melakukan berbagai perubahan untuk menata diri guna bersaing di tingkat global, seperti yang terjadi di Rusia dan Republik China. Di kedua negara ini tidak lagi memakai sistem komunisme secara ketat, melainkan telah berubah menjadi untuk sistem politik masih menerapkan kontrol pemerintah yang kuat (peranan Partai Komunis masih tetap kuat) sedangkan untuk sistem ekonomi berubah menjadi ekonomi terbuka dengan tetap ada pengawasan oleh pemerintah. Eks-

negarakomunissekaranginitelahmenjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang besar, dan mereka saat ini mulai menancapkan pengaruhnya di berbagai negara, termasuk di Indonesia

melalui kerjasama ekonomi dan investasi. Ideologi new-left yang berkembang di negara-negara eks-komunis ini mulai terasa pengaruhnya, saat reformasi yang memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, meskipun masih terselubung ternyata kelompok "new-left" telah tumbuh dan berkembang di Indonesia (catatan: dimotori oleh Kelompok 17 atau Kelompok Kaliurang).

Secara historis bangsa Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan negara-negara di Timur Tengah yang mempunyai ideologi Islamisme, karena hampir 85% penduduk Indonesia beragama Islam. Namun kini di Timur Tengah telah berkembang kelompok Islam Garis Keras, seperti kelompok Wahabi (Ikhwanul Muslimin), kelompok Al-Qaeda, dan kelompok ISIS, yang mempunyai pandangan ingin mendirikan Khilafah Islamiyah yang bersifat mendunia. Pengaruh kelompok Islam garis keras juga telah berkembang di Indonesia melalui berbagai organisasi (seperti : Jamaah Islamiyah, Hisbuth Thahir Indonesia, kelompok NII, kelompok ISIS dll), dan kelompok ini ingin merubah ideologi negara menjadi ideologi berdasar Syariat Islamiyah. Kelompok ini telah bergerak dan menyebarkan paham daulah islamiyahnya di tingkat grass-root melalui pengajian-pengajian, dan mengorganisir diri sangat solid dan kuat dengan membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lajskar-lasjkar. Disamping itu kelompok kedaerahan, kesukuan dan keagamaan yang sempit juga masih berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

Memperhatikan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem dan tata kehidupan global tersebut di atas, didapati fakta bahwa hal tersebut telah berimplikasi pada peran Pancasila sebagai ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum, dan pandangan hidup bangsa yaitu mengalami degradasi. Hal ini terlihat dari, sebagai contoh antara lain: Masuknya nilai-nilai yang didasarkan dan menjunjung tinggi prinsip individual ke dalam konstitusi negara, semisal: pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak dan diadopsinya secara penuh konsep hak asasi manusia.

Berbagai peraturan perundang-undangan banyak yang menyimpangi dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Semakin termarginalkannya ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Pancasila dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan berdasarkan hasil survey dari BPS dan Bappenas hampir 86% responden mahasiswa di 14 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan

cakupan nilai bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dan tata hubungan sosial. Bahkan hasil survey yang dilakukan oleh Lemhannas di 33 Provinsi menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan di dalam kehidupan masyarakat, pemuda dan kelompok terdidik mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Pemantapan Kembali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Bagian dari Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional

Wawasan kebangsaan, yang nilai-nilainya bersumber dari ideologi Pancasila, harus menjadi suatu kesadaran bagi seluruh komponen bangsa, dari rakyat kebanyakan (jelata) sampai para pejabat/pimpinan negara dan masyarakat. Diharapkan melalui kesadaran wawasan kebangsaan ini pengelolaan tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, solid, bersatu dan semua kepentingan rakyat, bangsa dan negara terakomodasikan. Sehingga bangsa Indonesia ke depan mampu bersaing dengan bangsa lain dan mampu mengeliminasi berbagai pengaruh negatif nilai-nilai kehidupan global, baik saat ini maupun yang akandatang.

Melalui penanaman, pengembangan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dimulai sejak dini yaitu melalui pendidikan anak-anak sekolah sampai orang meninggal dunia (sebagai long life education), diharapkan akan tumbuh rasa, jiwa dan semangat kebangsaan sebagai wujud pemikiran, sikap, dan tindakan yang dilandasi oleh nasionalisme yang kuat. Ketika semua pemikiran, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh rakyat/masyarakat dan seluruh pejabat/pimpinan negara dilandasi oleh rasa, jiwa dan semangat untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya, maka akan terbangun “national in-cooperated” dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan negara dan pelaksanaan pembangunan di seluruh aspek kehidupan (IPOLEK SOSBUD-HANKAM). Sehingga bangsa dan negara ini akan selalu tegak berdiri, bersatu dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam rangka mewujudkan wawasan kebangsaan ini, maka berbagai langkah kebijakan yang perlu diambil antara lain: Saat ini kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah (17 lembaga) namun dengan kurikulum, materi dan metode pengajaran yang berbeda-beda, serta belum terstruktur dan berkesinambungan, sehingga pemantapan wawasan kebangsaan bersifat sektoral dan partial dan bahkan seringkali terjadi perbedaan dan salah tafsir bagi para peserta didik. Oleh karena itu diperlukan suatu “Grand Desain Wawasan Kebangsaan” yang akan

menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan. Grand Desain Wawasan Kebangsaan ini diatur dalam suatu kebijakan politik (regulasi) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh kelembagaan negara dan seluruh komponen masyarakat.

Pentingnya ditunjuk suatu lembaga negara yang ditugasi untuk menjadi penjurur dan pembina dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman, pengembangan dan pemantapan wawasan kebangsaan.

Penanaman dan pengembangan wawasan kebangsaan harus dilakukan mulai sejak pendidikan dini sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan sebagai pendidikan sepanjang hidup (*long life education*). Oleh karena itu wawasan kebangsaan harus menjadi materi pelajaran yang termuat dalam kurikulum pelajaran untuk Pendidikan Tingkat Dasar (SD), Pendidikan Tingkat Lanjutan (SLTP dan SLTA), serta Perguruan Tinggi.

Mengingat bahwa saat ini berdasarkan hasil penelitian pemahaman wawasan kebangsaan di lingkungan aparatur negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) (baik pejabat Negara maupun aparatur pemerintah) juga telah mengalami degradasi/penurunan dilihat dari kesadaran akan jati-dirinya (misal: banyak yang tidak amanah, banyak yang korupsi) ataupun dilihat dari kesadaran terhadap sistem nasional ketika melaksanakan tugas-tugasnya (misal: banyak penyimpangan terhadap sistem dalam mengelola pemerintahan), maka pemantapan wawasan kebangsaan bagi kalangan aparatur negara menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Partai politik adalah pilar demokrasi dan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan secara demokratis, sebagai lembaga pendidikan politik bagi warganegara sehingga dapat menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajibannya, sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sebagai sarana rekrutmen dan pelatihan kader politik dan kader pimpinan nasional di semua lini kehidupan, sebagai sarana komunikasi politik dan sosialisasi kebijakan publik, serta sebagai pengemban etika politik dan budaya politik yang santun dan elegan. Mengingat betapa strategisnya partai politik dalam penyelenggaraan politik kenegaraan maka kepada jajaran pengurus partai politik di tingkat pusat dan daerah perlu diberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi penting bagi aparatur negara di lembaga-lembaga negara yang meliputi : 1) anggota-anggota legislatif pusat dan daerah (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); 2) anggota-anggota BPK; hakim-hakim di lingkungan peradilan (MA dengan peradilan jajarannya dan MK).

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan juga wajib ditanamkan kembali kepada pelaku-pelaku usaha/ekonomi nasional, mencakup kalangan pengusaha swasta besar-menengah-kecil, badan usahamilik Negara dankoperasi.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan juga wajib dilakukan kepada generasi muda, baik yang tergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan maupun yang tergabung melalui kegiatan pembinaan generasi muda seperti pramuka, badan eksekutif mahasiswa, korps Menwa dsbnya.

Penutup

Demikianlah beberapa pemikiran yang ingin saya sampaikan dalam rangka Seminar Nasional pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) ke-9, semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara serta bagi kita semua kaum akademisi. Sekian dan Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Adi Sujatno; 2013; *Filosofi Manusia & Kepemimpinan di Tinjau dari Falsafah Wayang*; PT. Yellow Mukti Multi Media; Jakarta.
- Adi Sujatno & Muladi; 2009; *Traktat Etis Kepemimpinan Nasional & IKNI*; RM Books; Jakarta.
- Adi Sujatno & Yayan MG; 2016. *Pendidikan Pancasila*; Kemkumham RI Jakarta.
- Heru Santoso, dkk; 2001; *Sari Pendidikan Pancasila (UUD 1945)*; PT.Tiara Wacana Yogya.
- Kaelan; 1986; *Filsafat Pancasila*; Paradigma Yogyakarta.
- _____; 2010; *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi*; Paradigma Yogyakarta.
- Lemhannas RI; 2016; *Modul BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional*; PPRA LV; Lemhannas RI Jakarta.
- Lemhannas RI; 2016; *Modul Bidang Studi Pancasila dan UUD NRI 1945* Lemhannas RI Jakarta.
- Miyasto; 2016; *Ceramah Labkurtanas*; PPRA LV; Lemhannas RI Jakarta.
- SoemarnoSoedarsono; 2009; *Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang*; PT. Elex Media Komputindo Jakarta.